

BAB V

KESIMPULAN

5.1 KESIMPULAN

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah saya lakukan, dapat ditarik kesimpulan latar belakang pemekaran kota Subulussalam adalah dimulai dari masyarakat Subulussalam yang tidak berhasil menjadikan Subulussalam menjadi ibukota Kabupaten Aceh Singkil, sehingga timbul lah niat untuk menjadikan Subulussalam menjadi daerah otonom baru, selain itu adanya ketentuan peraturan perundangan undangan yang membuka peluang untuk pemekaran wilayah. Jauhnya rentang kendali pemerintahan menyebabkan sulitnya masyarakat Subulussalam untuk mendapatkan pelayanan, hal ini disebabkan oleh kecamatan Aceh Singkil yang sangat luas, dan adanya potensi wilayah yang mana kondisi geografis Kota Subulussalam sangat strategis, Kota Subulussalam merupakan gerbang masuk yang menghubungkan Sumatera Utara dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga menjadi sebab dari pemekaran Kota Subulussalam.

Proses pemekaran Kota Subulussalam dapat dibagi dalam beberapa tahap berikut (1) Pada tahun 2003, Bapak Makmur Syahputra, menyampaikan peluang pemekaran Kota Subulussalam kepada Pak H. Asmauddin, H. Ansari Sambo dan beberapa tokoh lainnya bertemu di masjid As-Silmi. (2) Setelah adanya arahan dari pak Makmur Syahputra, para tokoh pemekaran mulai melakukan pertemuan-pertemuan tidak resmi untuk menghimpun para tokoh-tokoh masyarakat dari setiap kecamatan untuk membentuk panitia pemekaran. (3) Pada tanggal 28 Oktober tahun 2004, Ditetapkan panitia Pembentukan pemekaran Kota Subulussalam dengan

diketahui Bapak Asmauddin di lapangan beringin Subulussalam. (4) Untuk tahap awal pihak panitia pemekaran Kota Subulussalam meminta persetujuan dari bupati Aceh Singkil pak Makmur Syahputra Bancin, persetujuan DPRD Aceh Singkil, kemudian persetujuan dari DPR provinsi. (5) Pada tanggal 5 September tahun 2005 pukul 19.00 WIB Panitia Pemekaran Kota Subulussalam berangkat ke Jakarta untuk menepati janji pertemuan dengan Komisi II DPR RI. Tanggal 6 September Tahun 2005 pukul 08.00 WIB. Panitia pemekaran Kota Subulussalam tiba di gedung Nusantara DPR RI dan berkumpul di ruang komisi II DPR RI. (6) Pada tanggal 15 Juni 2007 diresmikan kota Subulussalam dan juga kota Pidie Jaya di gedung Anjong Mon Tama oleh Menteri Dalam Negeri Widodo AS. Dilantiknya PJ Walikota kota Subulussalam yaitu pak Asmauddin Sedangkan untuk kota Pidie Jaya yaitu Pak Haji Salman Ishak.

Dampak pemekaran Kota Subulussalam terhadap masyarakat setempat tampak dari berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, rumah ibadah, politik dan pembangunan infrastruktur kota Subulussalam. Pembangunan infrastruktur kota Subulussalam sangat terasa bagi masyarakat seperti pembangunan Kawasan-kawasan perkantoran, pembangunan jalan beraspal menuju kecamatan Longkib yang sebelumnya hanya jalan tanah, dan masih banyak dampak lainnya.

5.2 SARAN

Adapun saran dari penulis adalah diharapkan masyarakat Kota Subulussalam bekerja sama dengan pemerintah Kota untuk dapat menjaga fasilitas-fasilitas yang telah dibangun untuk menjadikan kota Subulussalam lebih baik lagi.

Diharapkan pemerintah lebih menaruh perhatian kepada sejarah-sejarah Kota Subulussalam, agar tidak lenyap dan dilupakan oleh generasi selanjutnya begitu saja.

